

Bupati dan dr Tirta Minta Masyarakat Jangan Takut Divaksin

NGEMPLAK (KR) - Usai disuntik vaksin Sinovac, Bupati Sleman Sri Purnomo mengaku tak merasakan efek apapun. Dalam vaksinasi tahap pertama di Kabupaten Sleman, selain 10 orang tokoh, ada pula 12.380 Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan secara bertahap akan menerima vaksin Covid-19 ini. Program vaksinasi Covid-19 ini kedepan akan menysasar 70 persen warga Sleman.

Bupati disuntik vaksin pada pukul 10.50 dan setelah lebih dari 30 menit tak merasakan efek apa pun. Dengan adanya program vaksinasi dari pusat ini, Bupati mengimbau agar masyarakat yang akan menerima vaksin agar jangan takut.

"Pegal-pegal dan gatal-gatal juga tidak terasa. Saat disuntik juga hanya seperti digigit semut setelah itu dipegang juga tidak terasa. Kalau vaksinya sendiri sudah ada izin dari BPOM dan

sertifikasi halal dari MUI," kata Bupati usai disuntik vaksin di Puskesmas Ngemplak II, Kamis (14/1).

Menurut Bupati, ke depan program vaksinasi akan menysasar 70 persen warga Sleman. Meski tidak akan dilakukan dalam waktu dekat, namun warga Sleman bisa menerima vaksin ini. Dengan mendapatkan vaksin, diharapkan akan timbul kekebalan di tubuh penerima vaksin. "Disarankan agar masyarakat mengikuti jika

sudah menerima jadwal vaksin. Selain itu di Kabupaten Sleman yang ada 52 fasilitas kesehatan yang melayani. Jadi masyarakat tinggal pilih mana yang paling dekat," sarannya.

Selain Bupati, perwakilan dari organisasi profesi kesehatan dr Tirta Mandira Hudhi atau yang lebih dikenal dengan sapaan dokter Tirta juga divaksin. Ia mengaku divaksin karena Sinovac sudah terjamin uji klinis tahap ketiga oleh Biofarma



Bupati saat menerima vaksin Sinovac di Puskesmas Ngemplak II Sleman, Kamis (13/1).

dan BPOM.

dr Tirta menjelaskan, vaksin Sinovac ini juga memiliki efikasi sebesar 65,3 persen dan kelebihan Sinovac adalah pada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) di bawah 1 persen. Dengan disuntik vaksin Sinovac, perburukan

kondisi saat terkena Covid-19 akan tiga kali lebih rendah.

"Sebelumnya saya juga mendapat tawaran bisa mendapatkan vaksin di Istana Negara. Namun setelah berdiskusi, alangkah lebih elok kalau nakes-nakes anak muda disuntiknya di Puskesmas



dr Tirta juga saat menerima vaksin Sinovac.

agar menjadi sarana edukasi bagi masyarakat," urainya.

Tirta berharap, dengan mengikuti vaksin di Puskesmas Ngemplak, masyarakat bisa lebih percaya dengan program vaksin dari pemerintah. Sehingga *trust* isu meningkat dan bisa menangkis isu hoaks

yang banyak beredar.

"Pemberian vaksin ini akan dilakukan dua kali. Sehingga dua minggu dari pemberian vaksin yang pertama, saya akan datang kembali ke Puskesmas Ngemplak II untuk menerima vaksin yang sama," ujarnya. **(Aha)-f**

Penyerahan LKPD Sleman Tercepat di DIY

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (13/1) sore. LKPD diserahkan Kepala BKAD Sleman Haris Sutarta, diterima Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DIY Jariyatna di Kantor BPK RI Perwakilan DIY.



Kepala BKAD Sleman Haris Sutarta menyerahkan LKPD ke BPK Perwakilan DIY.

Menurut Haris Sutarta, penyerahan LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2020 kepada BPK RI perwakilan DIY ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintahan daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Yakni dengan penyusunan

Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang berkualitas.

Disebutkan, pencapaian kinerja APBD Pemkab Sleman Tahun 2020 dalam hal pendapatan daerah target kinerjanya efektif. Hal ini dapat dilihat dari persentase penerimaan pendapatan daerah dari

target pendapatan daerah tahun 2020 sebesar Rp 2.538.365.662.110,00 dapat direalisasikan Rp 2.646.077.465.912,73 atau 104,24 %.

Adapun untuk belanja daerah anggaran sebesar Rp 2.908.092.312.851,78 dapat direalisasikan Rp 2.637.195.804.485,59 atau 90,68 %. Sedangkan Pen-

dapatan Asli Daerah (PAD) dengan target Rp 676.743.940.021,93 dapat terealisasi Rp 788.246.742.427,73 atau 116,47 %.

Ditambahkan Haris, pada tahun 2020 Pemkab Sleman mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-9 kalinya atas LKPD Tahun 2019. "Oleh karena itu, diharapkan pada tahun 2021 ini Pemkab Sleman dapat mempertahankan predikat WTP untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut," tandasnya.

Sementara Kepala BPK RI DIY Jariyatna memberi apresiasi kepada Pemkab Sleman yang komitmen dan patuh untuk menyerahkan LKPD tepat waktu. "Bahkan merupakan yang pertama di DIY dan ketiga tercepat di Indonesia," ujarnya. **(Has)-f**

Sleman Rancang Raperda Penanggulangan Pandemi

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman sedang merancang draf rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penanggulangan penyebaran penyakit penular/pandemi. Tujuannya agar penegakan terhadap protokol kesehatan di masyarakat lebih efektif.

Kabag Hukum Setda Sleman Edi Harmono SH MHum didampingi Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Sleman Hendra Adi SH MH menjelaskan, sebenarnya Sleman telah menerbitkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 37.1 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Namun ternyata hal itu kurang memberikan efek jera terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

"Untuk memperkuat penegakan dan membuat efek jera, perlu membuat peraturan yang lebih besar dan kuat lagi dibandingkan Peraturan Bupati yang telah ada. Makanya kami sedang menyusun draf raperda tentang pengendalian pan-

demi," jelasnya, Kamis (14/1).

Menurut Edi, tujuan raperda itu dapat mengatur yang lebih spesifik dan mampu mengatasi permasalahan mengenai penyakit menular yang tidak hanya terhadap Covid-19 saja. Namun semua penyakit menular yang akan datang, ditularkan langsung oleh manusia kepada manusia. "Jadi ini tidak hanya mengatur tentang pandemi Covid-19 saja. Tapi menanggulangi penyakit pandemi lainnya jika sewaktu-waktu terjadi," paparnya.

Hendra menambahkan, dalam raperda itu nanti akan ada upaya pemerintah dalam pengendalian penyakit menular mulai edukasi kepada masyarakat maupun pendanaan. Kemudian juga ada kewajiban dari masyarakat, pelaku usaha dan dunia pendidikan dalam penerapan protokol kesehatan.

"Jadi penanggulangan pandemi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Tapi juga peran serta masyarakat, pelaku usaha dan dunia pendidikan," ujarnya. **(Sni)-f**

JEMAAH HARUS MEMAKAI MASKER

Tempat Ibadah Wajib Patuhi Prokes

SLEMAN (KR) - Mayoritas tempat ibadah di Kabupaten Sleman telah melakukan kegiatan ibadah. Meski tidak ada kebijakan baru, selama Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM), semua tempat ibadah wajib menerapkan protokol kesehatan (prokes).



Sa'ban Nuroni.

Kepala Kementerian Agama Sleman Sa'ban Nuroni mengatakan, hampir semua tempat ibadah saat ini sudah melakukan kegiatan. Sesuai regulasi, sebenarnya tempat ibadah harus mengajukan surat rekomendasi ke Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sleman. Namun belakangan ini, tempat ibadah sudah melakukan kegiatan meski belum sepenuhnya terbuka untuk umum, hanya untuk kalangan sendiri atau terbatas.

"Sesuai Surat Edaran Bupati tentang kegiatan di tempat ibadah selama PTKM yakni mengutamakan kembali edaran sebelumnya. Kegiatan ibadah bisa berjalan tapi tetap menerapkan prokes. Baik pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan 50 persen dari kapasitas tempat ibadah," kata Sa'ban di kantornya, Kamis (14/1).

Sa'ban mengimbau, agar kegiatan di tempat ibadah

harus disiplin menerapkan prokes. Apalagi penggunaan masker harus selalu digunakan. Meski tidak ada petugas yang akan melakukan pemantauan langsung, pihaknya sebelumnya sudah melakukan sosialisasi hal-hal yang harus dilakukan jika tempat ibadah melakukan kegiatan bagi jamaah. Sedangkan untuk pemantauan, Kemenag Sleman akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang saat ini juga sudah ada di tingkat Kapanewon hingga Padukuhan.

"Dulu di awal pandemi ada sekian ratus tempat ibadah yang mengajukan surat rekomendasi ke Gugus Tugas. Tapi belakangan ini, banyak yang tidak mengajukan rekomendasi tapi tetap melakukan kegiatan ibadah," tandas Sa'ban. **(Aha)-f**

TAK PERMASALAHKAN PTKM

Omzet Pelaku Usaha Turun Hingga 70 Persen

DEPOK (KR) - Sejumlah pelaku usaha kuliner di Depok Sleman mengaku tidak mempermasalahkan pengetatan jam operasional usaha. Meskipun omzet turun hingga 70 persen, namun mereka akan mengikuti aturan yang dibuat sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran Covid-19.



Pelaku usaha di Depok saat mengikuti sosialisasi.

"Kami tidak mempermasalahkan, apalagi hanya untuk dua pekan. Dengan pengetatan ini, sebenarnya omzet turun hingga 70 persen. Namun tidak masalah daripada keluar biaya untuk pengobatan Covid, kan lebih besar," ungkap Elizabet, pelaku usaha kuliner di Depok Sleman usai mengikuti sosialisasi yang diadakan Muspika Kapanewon Depok, Kamis (14/1).

Sementara Panewu Depok Abu Bakar mengatakan, Muspika setempat se-

ngaja mengumpulkan para pelaku usaha kuliner. "Mereka kami kumpulkan untuk sosialisasi terkait kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM). Kenapa pelaku kuliner? Karena dari sekitar 6.500 usaha kuliner yang ada di Jogja, hampir 70 persen ada di Depok. Jadi mereka kita *ayomi bareng*," tandasnya. **(Ayu)-f**

Kedaulatan Rakyat
EPAPER
www.kr.co.id

Berlangganan Scan Barcode

Harian Kedaulatan Rakyat juga hadir dalam format koran digital atau electronic paper (epaper). Sajian berita-berita Kedaulatan Rakyat dapat Anda nikmati melalui genggaman tangan Anda. Sekarang.